

Pancasila: Ideology Negara dalam Pendekatan Pendidikan

Hambali¹, Hariyanti², Jumili Arianto³, Radini⁴

^{1,2,3,4} Universitas Riau, Indonesia

hambali@lecturer.unri.ac.id

Abstrak. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan historisitas lahirnya konsepsi Pancasila serta pro kontra yang muncul mengenai pencipta Pancasila serta upaya untuk menginternalisasikan Pancasila dalam pendekatan Pendidikan di persekolahan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Artikel ini menggunakan metode *literature review* dalam menganalisis masalah dan mencari solusi melalui analisis teori dan hasil penelitian mengenai permasalahan terkait. Berdasarkan analisis dokumen diketahui bahwa Pancasila merupakan karya bangsa Indonesia yang digali dari nilai-nilai luhur kebudayaan, soekarno hanya menggali Mutiara tersebut dan merumuskannya dalam satu konsepsi yang disebut Pancasila, namun konsepsi tersebut berbeda dengan Pancasila yang berlaku saat ini sebagaimana yang disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 sebagai ideologi negara. Pancasila harus terus diinternalisasikan khususnya dalam pendekatan Pendidikan, tidak hanya melalui mata pelajaran di kelas tetapi juga dapat melalui kegiatan ekstrakurikuler kecerdasan berideologi. Sebuah pemikiran untuk kembali membuat Pancasila *easy to discuss* namun melalui cara yang edukatif, bukan indoktrinatif.

Kata kunci: Pancasila; Ideologi Negara; Pendidikan

1. Pendahuluan

Pancasila—secara etimologis berasal dari bahasa *sansekerta* dari dua suku kata, *panca* yang berarti lima dan *sila* yang berarti dasar, secara harfiah artinya lima dasar. Istilah inilah yang digunakan oleh bung karno untuk memperkenalkan gagasannya mengenai dasar negara pada 1 juni 1945 dalam sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei-1 juni 1945. Bung karno merupakan salah seorang anggota BPUPKI yang berpidato untuk menyampaikan gagasan tentang dasar negara guna menjawab pertanyaan sang ketua sidang sekaligus ketua BPUPKI dr.KRT Radjiman Widiadinigrat “apa dasar dari negara yang akan kita bangun”. Dari pertanyaan inilah, ide-ide brilliant anak bangsa muncul untuk negara yang akan dibangun bersama sekaligus juga menjadi sumber pro kontra dalam lintasan sejarah Indonesia kemudian.

Pancasila merupakan ideologi yang digali dari nilai-nilai luhur budaya bangsa, sehingga mampu mempersatukan bangsa yang multikultural atau beragam (Ahmad Eddison, Hambali, 2023). Franz Magnis-Suseso (2009) menyatakan bahwa di Indonesia kebersamaan nilai terungkap dalam pancasila. Itulah yang mempersatukan warga negara yang berbeda budaya, ras, bahasa, agama bahkan keyakinan politik. Negara majemuk seperti indonesia (negara kebangsaan) hanya bisa bertahan kalau kemajemukan tersebut dihormati. Yudi Latif di dalam buku Negara Paripurna (2016) mengatakan bahwa Indonesia telah memiliki prinsip dan visi kebangsaan yang kuat, yang bukan saja dapat mempertemukan kemajemukan masyarakat dalam kebaruan komunitas politik bersama tetapi juga mampu memberi kemungkinan bagi

keragaman komunitas untuk tidak tercerabut dari akar tradisi dan kesejarahannya masing-masing.

Oleh karena itu, Nilai-nilai pancasila harus dihayati, diinternalisasi dan diterapkan dalam semua bidang kehidupan warga negara. Namun, diajarkan melalui cara-cara yang edukatif (menghindari cara-cara indoktrinatif) dan tidak lagi dijadikan alat untuk mempertahankan pengaruh politik karena hal semacam itu merupakan pikiran pragmatis yang dapat menghancurkan pancasila utamanya bangsa indonesia dari dalam dirinya sendiri (Ahmad Eddison, Hambali, 2020). Pendekatan pendidikan untuk mengajarkan pancasila kepada warga negara diperlukan sehingga urgensi pendidikan ideology penting diberikan di sekolah, salah satunya melalui kegiatan ekstrakurikuler kecerdasan berideologi. Sebuah pemikiran untuk kembali membuat Pancasila *easy to discuss* namun melalui cara yang edukatif, bukan indoktrinatif.

Aktualisasi ideology pancasila dewasa ini berada pada lingkungan global yang ditandai dengan persaingan ideology besar dunia yang menyebabkan semakin rumit masalah-masalah sosial politik yang dihadapi negara-negara berkembang. Kondisi ini menuntut adanya upaya revitalisasi pemahaman warga negara terhadap ideology (Mughtar & Iswandi, 2018).

2. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode kajian literatur berupa teori-teori dan hasil penelitian yang terkait dengan tema pembahasan. Metode kajian literature merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Pembahasan tema dilakukan secara deskriptif dan selanjutnya menghasilkan kesimpulan yang bersifat induktif

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Historisitas Kelahiran Dan Pro Kontra Pancasila

Istilah Pancasila pertama kali muncul dalam siding BPUPK 1, tepatnya pada 1 juni 1945, dimana soekarno mengemukakan gagasannya mengenai konsepsi dasar negara yang dinamai Pancasila. Sebelumnya pada tanggal 29 Mei 1945, Mr.Muhammad Yamin telah mengemukakan gagasannya pada 29 Mei 1945, gagasan mengenai butir dasar negara dari Mr.M.Yamin tersebut,

1. Peri kebangsaan
2. Peri kemanusiaan
3. Peri kerakyatan
4. peri kesejahteraan
5. kesejahteraan sosial.

Namun belakangan publik digegerkan dengan terbitnya buku yamin “naskah persiapan UUD 1945 Jilid 1 dan Jilid 2” pada tahun 1959. Di dalam buku tersebut yamin mengatakan bahwa pada pidato tanggal 29 mei 1945, dia menyampaikan dasar negara seperti isi teks pancasila yang ada sekarang dan sorenya dia memberikan naskah UUD 1945 persis seperti yang

2553

ada sekarang. Banyak pihak yang menyangsikan pernyataan yamin dalam bukunya dan bahkan ada pula pihak yang terang-terangan mendukung isi buku yamin tersebut dengan mengakomodir sejumlah sumber untuk menguatkan argumennya. Para pelaku sejarah yang masih hidup seperti bung hatta dan A.G Pringgodigdo jengkel dengan ulah yamin karena telah memutar balik sejarah untuk kepentingannya sendiri. Hatta mengatakan bahwa yamin “licik” dan A.G Pringgodigdo mengatakan bahwa yamin “pinter nyulap”. Diantara banyak yang membantah, ada pula pihak yang terang-terangan mendukung isi buku yamin tersebut dengan mengakomodir sejumlah sumber untuk menguatkan argumennya.

Prof Nugroho Susanto di dalam bukunya proses perumusan pancasila yang terbit tahun 1985 menyatakan bahwa gagasan pancasila yang disampaikan oleh sukarno pada 1 Juni 1945 bukanlah pancasila sebagai dasar negara sebagaimana yang disahkan oleh sidang PPKI pada 18 agustus 1945. Nugroho menyimpulkan: 1 juni hanyalah hari kelahiran pancasila nya bung karno sedangkan pancasila sebagai dasar negara baru dilahirkan pada 18 agustus 1945, ketika pembukaan UUD 1945 disahkan oleh PPKI. Menurut nugroho, bung karno pun bukan satu-satunya penggali pancasila. Katanya,masih ada yamin dan soepomo,yang juga menyodorkan konsepsi dasar negara sewaktu berpidato pada putaran pertama sidang BPUPKI. Kesimpulan nugroho itu semakin melukai pendukung sukarno. Buku nugroho notosusanto terbit pada 1985 saat pemerintahan orde baru berkuasa. Dari awal masa pemerintahan orde baru telah terdapat tanda-tanda untuk menghilangkan pengaruh politik bung karno dan menyingkirkan satu persatu para loyalis bung karno, bahkan Ananda B.Kusuma mengatakan bahwa tulisan buku ini merupakan salah satu bentuk dari upaya menghilangkan pengaruh bung karno. Ananda B.Kusuma,peneliti senior di pusat studi hukum tata negara UI termasuk yang gigih menentang kesimpulan bahwa yamin yang pertama kali memunculkan rumusan dasar negara. “tulisan seperti itu merupakan upaya de sukarnoisasi” kata ananda dalam diskusi di kantor tempo,pertengahan Juli 2014.

Pendapat Nugroho Notosusanto tidak berbeda jauh dengan yang dikemukakan oleh Prof.Notonagoro bahwa pancasila tidak diciptakan oleh soekarno tapi dia hanya menemukan dan membungkusnya dalam sebuah kata yang disebut pancasila karena asas-asas yang terdapat dalam sila-sila pancasila sesungguhnya telah terdapat dalam adat-istiadat,kebudayaan dan keagamaan di Indonesia.

Sungguh ketika belum bernegara Republik Indonesia yang kita proklamasikan, bangsa kita sudah berpancasila, bagaimanapun juga beraneka rupa keadaan-keadaan pada suku-suku bangsa, dalam hal adat istiadat, dalam hal kebudayaan dalam arti luas, dalam hal keagamaan namun di dalamnya terdapat kesamaan unsur-unsur tertentu. Unsur-unsur yang terdapat dalam pancasila sudah terdapat sebagai asas-asas dalam adat istiadat kita, dalam kebudayaan kita dan dalam kehidupan beragama dan setelah kita bernegara kita tambahkan kedudukan baru pada unsur-unsur itu sebagai asas kenegaraan kita. Dengan demikian banyak sedikit dapat diistilahkan bahwa kita berpancasila dalam tri prakara dalam tiga jenis, yang bersama-sama kita miliki,maka tidak ada pertentangan antara pancasila negara, pancasila adat kebudayaan dan pancasila religius. Ketiganya saling memperkuat negara.(Prof.Notonagoro: 6)

Pancasila sebagai dasar filsafat dan kerohanian negara menurut notonegoro terdapat dalam pembukaan UUD 1945, keduanya memiliki sejarah masing-masing. Pancasila sebagai dasar negara disusun pada 22 Juni 1945 yang dikenal dengan piagam jakarta yang dihasilkan melalui musyawarah panjang dalam panitia 9 yang dibentuk oleh bung karno dengan alasan pentingnya keadaan ketika itu. Sementara pembukaan UUD 1945 dibentuk oleh panitia hukum dasar BPUPKI dan disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 agustus 1945. Dalam pembukaan ini termuat didalamnya butir-butir pancasila yang terdapat dalam alinea keempat.

Pembukaan ini merupakan hukum dasar negara kita sebagai penjelmaan dari proklamasi kemerdekaan kita. Seperti pulau tidak dapat terjadi ada tanpa perairan dan dasar laut. Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan negara republik indonesia menjadinya ada baru dengan adanya pembukaan undang-undang dasar 1945. Terbentuknya undang-undang dasar 1945 sesudah pembukaan itu ada. (Prof.Notonagoro: 8)

Bung karno tidak pernah menyatakan bahwa dirinya adalah pencipta dan penggagas dari ideologi pancasila, bung karno menyatakan bahwa dia hanya menggali kebudayaan bangsa indonesia dan menemukan lima butir mutiara yang kelak diberi nama pancasila atas saran seorang temannya yang ahli bahasa, seperti yang diterangkan oleh bung karno dalam penuturannya kepada Cindy Adams (buku bung karno penyambung lidah rakyat),

Di flores yang sepi dimana aku tidak memiliki kawan,aku telah menghabiskan waktu berjam-jam lamanya di bawah sebatang pohon di halaman rumahku, merenungkan ilham yang diwahyukan oleh Tuhan, yang kemudian dikenal sebagai pancasila. Aku tidak mengatakan,bahwa aku menciptakan pancasila. Apa yang kukerjakan hanyalah menggali jauh ke dalam bumi kami tradisi-tradisi kami sendiri dan aku menemukan lima butir mutiara yang indah.

Bung karno memikirkan sila-sila pancasila sebagaimana yang dinyatakannya pada 1 Juni 1945 ketika ia dibuang ke Ende Flores. Bung karno diinternir ke flores pada akhir tahun 1933 karena dianggap tidak dapat merubah sikapnya dalam menyebarkan kebencian kepada pemerintah. Sebelumnya pada tahun 1929, bung karno ditangkap oleh polisi hindia belanda bersama 3 orang temannya yakni gatot mangkupraja, supriadinata dan maskun karena diduga menyebarkan kebencian kepada pemerintah melalui partainya, PNI yang didirikan pada juni 1927. Di pengadilan bung karno divonis selama 4 tahun penjara dan dikurung di penjara sukamiskin Bandung. Namun, selang waktu 8 bulan menghirup udara bebas, bung karno kembali ditangkap dan kali ini diinternir atau diasingkan ke Ende Flores dan pada akhir tahun 1938 dipindahkan ke Bengkulu akibat desakan *volksraad* dan warga belanda yang simpati terhadap perjuangan Indonesia lantaran bung karno mengalami sakit keras akibat terserang malaria di Flores. Mereka meminta tempat dan lingkungan yang lebih layak bagi bung karno.

Pada sidang I BPUPKI yang berlangsung 29 Mei -1 Juni, bung karno memperkenalkan butir-butir dasar negara yang diberinya nama pancasila berdasarkan saran dari seorang temannya yang ahli bahasa. Bung karno berpidato pada hari terakhir sidang pada 1 juni 1945. Namun, ada satu hal yang mesti diingat bahwa pancasila yang diperkenalkan oleh bung karno ketika itu berbeda dengan butir sila-sila pancasila yang disahkan sebagai dasar negara

bersamaan dengan pengesahan UUD 1945 pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Kita memang tidak dapat menutup mata bahwa keterkaitan Bung Karno dengan Pancasila tidak dapat diabaikan, setidaknya kita mengakui bahwa sila-sila Pancasila yang ada saat ini sedikit banyak terdapat sumbangan buah pikiran Bung Karno baik secara pribadi pada pidato di sidang BPUPKI maupun ketika menjadi ketua tim panitia 9 yang dibentuknya yang bertugas merumuskan dasar negara yang ketika itu diberi nama Piagam Jakarta,

Aku menjelaskan, hari depan kami harus berdasar kepada kebangsaan, karena orang dan tempat tidak dapat dipisahkan! tidak dapat dipisahkan rakyat dari bumi yang ada di bawah kakinya.”

Kemudian aku menguraikan batas-batas dari kebangsaan kami ‘Allah SWT membuat peta dunia. Seorang anak kecil pun—jikalau dia melihat peta dunia ---dapat menunjukkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan kepulauan diantara Samudera Pasifik dan Lautan Hindia dan diantara benua Asia dan Australia. Bangsa Indonesia karena itu meliputi semua orang yang bertempat tinggal di seluruh kepulauan Indonesia dari Sabang di ujung utara Sumatera, sampai Merauke di Papua.

Lalu aku menuju pada mutiara kedua. Internasionalisme. “itu bukanlah Indonesia *uber alles*,” kataku tegas. “Indonesia hanya satu bagian kecil saja dari dunia. Ingatlah kata-kata Gandhi, saya seorang nasionalis, tetapi kebangsaan saya adalah perikemanusiaan.”

Berpidato tanpa teks, aku mengingatkan mereka untuk melawan pandangan yang tidak benar yang menganggap ada keunggulan dari bangsa Arya yang berambut jagung dan bermata biru. Dan aku menyampaikan kepada sidang “nasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak hidup dalam taman sari internasionalisme”.

Mutiara ketiga adalah demokrasi. Selama berabad-abad negeri kami hidup dengan kebiasaan asli berupa musyawarah dan mufakat. Ini adalah perundingan demokratis model Asia. Sebagai seseorang yang meyakini bahwa kekuatan terletak pada dalam pemerintahan atas dasar perwalian, aku berkata” kita tidak akan menjadi negara untuk satu orang atau satu golongan “ tetapi “semua buat semua, satu buat semua, semua buat satu”.

“Biarlah orang-orang Islam bekerja sehebat-hebatnya, agar supaya sebagian terbesar dari kursi-kursi dewan perwakilan rakyat diduduki oleh utusan-utusan Islam. Kalau misalnya orang Kristen ingin tiap-tiap peraturan negara Indonesia dijiwai Injil, bekerjalah mati-matian, agar supaya sebagian besar dari utusan-utusan adalah orang-orang Kristen. Itu adil!

“seperti halnya kita menumbuk dan membersihkan sekam dari padi agar diperoleh beras, biarkan pikiran kita terus-menerus bergosokan satu sama lain.”

Mutiara keempat adalah keadilan sosial. “apakah kita mau indonesia merdeka, yang kaum kapitalisnya merajalela ataukah semua rakyatnya sejahtera karena merasa diayomi oleh ibu pertiwi yang cukup memberi sandang pangan kepadanya?”tanyaku.

Aku mengingatkan mereka bahwa generasi kita telah lama mengharapkan datangnya ratu adil yang berarti keadilan sosial. “kita tidak menghendaki persamaan politik semata,” kataku tegas. “kita ingin demokrasi sosial. Demokrasi ekonomi. Satu dunia baru di dalam mana terdapat kesejahteraan bersama.”yang terakhir adalah ketuhanan yang maha esa:” marilah kita menyusun indonesia merdeka dengan bertakwa kepada tuhan yang maha esa”,tetapi”biarkan masing-masing orang indonesia bertuhan tuhannya sendiri. Hendaklah tiap-tiap orang menjalankan ibadahnya sesuai cara yang dipilihnya. Marilah kita jalankan asas kelima dengan cara yang berkeadaban: percaya kepada tuhan yang maha esa dengan menghormati satu sama lain.”

Pidatoku yang memakan waktu lama itu kuakhiri dengan memperkenalkan nama pancasila. Yang jika kuperas yang lima ini menjadi satu maka dapatlah satu perkataan tulen yaitu perkataan gotong royong. Gotong royong adalah pembantingan tulang bersama,pemerasan keringat bersama,perjuangan bantu membantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua”.

Menjelang sidang PPKI 18 agustus terdapat kompromi diantara pemimpin dan tokoh bangsa ini untuk menghindari disintergrasi dari sebuah negara baru yang dibangun sehingga berdasarkan kesepakatan ketika itu dihapus 7 kata dalam ayat pertama piagam jakarta dan namanya juga diubah menjadi pancasila. Tanggal 1 juni diperingati sebagai lahir pancasila ketika masa pemerintahan orde lama berlangsung, namun seiring dengan redupnya pengaruh bung karno dan akhir masa kekuasaannya, tepatnya pada 1970 peringatan hari lahir pancasila tidak lagi dilaksanakan. Hal ini terjadi ketika masa pemerintahan orde baru di bawah pemerintahan soeharto. Kita tidak dapat menutup mata bahwa hal ini tidak terlepas dari kepentingan politik untuk menghilangkan bung karno dan mendiskreditkan perannya dalam perjuangan dan persiapan kemerdekaan indonesia, tidak lain hal ini untuk mempertahankan kekuasaan soeharto dan memberangus semua pengaruh dan loyalis soekarno yang dinilai masih membahayakan kekuasaannya. Maklum sejak 1970,pemerintah orde baru melarang peringatan hari lahirnya pancasila setiap 1 juni. Menurut sejarawan alvi warman adam,larangan memperingati itu datang dari komando operasi pemulihan keamanan dan ketertiban (Kopkamtib),lembaga yang dipakai orde baru untuk membungkam lawan-lawan politiknya.

Awal masa pemerintahan soeharto, ramai dikenalkan jargon/istilah “mejalankan pancasila secara murni dan konsekuen”, dari jargon ini terdapat kesan bahwa pemerintahan yang sebelumnya telah menyimpang dari pancasila dan UUD 1945 atau tidak menjalankan UUD 1945 dan pancasila secara murni dan konsekuen. Melalui TAP MPR No.II/MPR/1978 tentang P4, Pancasila diberikan dan diajarkan kepada masyarakat melalui sebuah badan yang disebut BP7, Pancasila diajarkan secara berjenjang dan wajib untuk semua warga negara, diajarkan secara massive. Mereka yang tidak taat kepada pemerintah dikatakan “tidak

pancasilais” dan dianggap melakukan tindakan subversif atau makar. Dapat dikatakan bahwa pancasila Pada masa pemerintahan soeharto diajarkan secara indoktrinasi. Penafsiran tunggal pancasila dilakukan oleh penguasa dan masyarakat harus menjalankan semua jabaran dari nilai-nilai pancasila seperti yang ditafsirkan. Singkat kata, pancasila ditafsirkan secara sepihak, kaku, dan kental dengan muatan politik. Namun, harus diakui bahwa ketika itu pancasila begitu “membumi” dibandingkan dengan masa setelah reformasi. Ketika orde baru tumbang dan reformasi bergulir, pancasila tidak lagi diperkenalkan melalui BP7 dan tidak lagi ditafsirkan secara tunggal dan tidak diajarkan secara massive dan indoktrinasi (Alim, 2019; Raharjo, 2020)

Kelemahan yang terjadi adalah pancasila seolah telah ditinggalkan, pasca orde baru masyarakat cenderung meninggalkan beberapa kebijakannya termasuk dalam membumikan pancasila. Pancasila dianggap sebagai momok yang kaku dan alat untuk mempertahankan kekuasaan. Generasi muda saat ini tidak kenal lagi dengan nilai-nilai moral yang terkandung dalam pancasila bahkan tidak hafal dengan sila-sila pancasila. Hal ini tentu mengkhawatirkan karena pancasila sebagai ideologi negara dan pandangan hidup bangsa tentunya harus terus melekat dan membatin dalam setiap manusia Indonesia (Hasanah, 2021). Pancasila memang berasal dari budaya dan keagamaan indonesia namun harus tetap diajarkan dan diperkenalkan sesuai dengan keadaan zaman.

Jadi pancasila adalah inti-inti kesamaan yang terdapat dalam adat kebiasaan, kebudayaan dan agama-agama bangsa indonesia yang menurut kenyataannya begitu beraneka warna. Tentu masih ada hal-hal yang merupakan kesamaan,akan tetapi semuanya dapat dikembalikan kepada inti-inti yang menjadi sila-sila pancasila,jadi hanya menjadi perincian dari padanya. (Prof.Notonagoro: 27).

Secara kultural, dasar-dasar pemikiran dan orientasi pancasila pada hakikatnya bertumpu pada budaya bangsa. Pancasila merupakan cerminan nilai-nilai budaya baik tradisional maupun modern, hal inilah yang membuat pancasila merupakan ciri khas dari Indonesia sebagai sebuah negara bangsa yang multikultural namun dapat hidup damai dan berdampingan. Selain itu, sebagai ideology yang terbuka, pancasila mampu menyesuaikan diri dan tidak kaku dengan perkembangan zaman sehingga dapat terus dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan negara serta tidak memonopoli kebenaran sehingga terkesan dipaksakan (Widodo et al., 2022). Hal ini berbeda misalnya dengan ideology komunisme. Komunisme sebagai ideologi totaliter menuntut sebagai satu-satunya ideology dan pandangan hidup yang mencakup sepenuhnya seluruh kehidupan manusia. Ideology komunis memberikan gambaran masyarakat yang harus dicapai serta sarana yang perlu disediakan. Perbedaan pendapat mengenai ilmu tidak dipecahkan penelitian ilmiah melainkan ditentukan dalam perdebatan ideologis dimana komite sentral partai komunis memberikan keputusan yang definitif. Perbandingan lain juga dapat ditujukan pada ideology liberalism. Ideology liberal menekankan kebebasan individu sehingga mengembangkan sikap individualism liberal yang cenderung mempertahankan *status quo* dan kurang tanggap terhadap masalah-masalah sosial maupun dalam konteks global (negara-negara berkembang) dalam hal pemerataan kesejahteraan keadilan.

Masyarakat yang individualis bukanlah cerminan dari masyarakat Indonesia, orang Indonesia dikenal sebagai pribadi yang hangat, suka bekerjasama sehingga terbentuk prinsip gotong royong dan kekeluargaan serta komunal. Pancasila sebagai ideology negara memberikan orientasi dan wawasan, asas dan pedoman yang normative serta dituangkan dalam dalam seluruh bidang kehidupan negara baik sosial, ekonomi, politik, budaya maupun hankam (Hariyanti, 2022).

Internalisasi Nilai Pancasila Melalui Ekstrakurikuler Kecerdasan Berideologi

Pendekatan pendidikan diperlukan karena kekuatan ideology bertumpu pada kekuatan warga negara sebagai subyek pendukungnya sehingga ideology pancasila dengan dukungan kecerdasan intelektual ideologis mampu memberikan pandangan kritis terhadap setiap problem sosial yang dihadapi bangsa Indonesia dalam kehidupan bernegara. Untuk menjawab tantangan tersebut diperlukan upaya revitalisasi pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan ideology pancasila. Pendekatan ini menuntut adanya transformasi pembelajaran kepada kemampuan berpikir tingkat tinggi dan bernilai ideology (Mughtar, 2020). Konflik-konflik horizontal maupun vertical yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah tantangan dalam mengaplikasikan nilai-nilai pancasila, ditambah dengan persoalan global yang turut mempengaruhi stabilitas di dalam negeri (Kardiman et al., 2020). Kecerdasan berideologi mutlak diperlukan oleh setiap warga negara sehingga dapat menghayati, menginternalisasi dan mengaplikasikan nilai-nilai pancasila dalam kehidupannya. Kecerdasan berideologi melalui pendidikan terwujud dalam pendidikan pancasila dan kewarganegaraan (PPKn) di sekolah. Revitalisasi PPKn sebagai pendidikan ideology tidak hanya dilakukan dalam kelas ketika proses pembelajaran berlangsung, tetapi dapat diwujudkan dalam kegiatan ekstrakurikuler di bawah koordinasi guru PPKn kerjasama dengan guru agama dan budi pekerti serta warga sekolah lainnya.

Pendidikan ideology melalui cara-cara yang edukatif dan menyenangkan dapat dilakukan dengan membentuk sebuah kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler ini sebaiknya dilakukan di jenjang SMA/SMK/MA sebab peserta didik dalam tataran ini telah cukup diasumsikan memiliki pengetahuan dan pemahaman awal yang baik mengenai pancasila. Peserta didik dituntut mengembangkan apa yang telah dipelajari dari sumber yang diberikan guru maupun sumber yang dicari secara mandiri setelah itu mampu merefleksikannya, outputnya diharapkan pada aplikasi nilai-nilai pancasila melalui kesadaran sendiri. Ekskul utama ini dinamakan “cerdas berideologi”. Ekskul ini dapat dijadikan sebagai mode pelatihan kepemimpinan yang berbasis pada nilai sila-sila pancasila dan dijadikan sebagai kegiatan inti untuk melatih, mempersiapkan dan memberi pembekalan kepada setiap peserta didik yang berminat aktif dalam semua kegiatan ekstrakurikuler sekolah.

Jadi dapat dikatakan bahwa sebelum mereka aktif dan terjun dalam kegiatan ekstrakurikuler lainnya seperti paskibraka, pramuka, PMR atau ROHIS, mereka harus terlebih dahulu mengikuti pelatihan kepemimpinan jiwa pancasila terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan dan memantapkan jiwa kepemimpinan beradbasar kepada sila pancasila sehingga nantinya dalam ekskul peminatan masing-masing mampu menerapkan apa yang

mereka dapat di kegiatan ekstrakurikuler cerdas berideologi. Diharapkan akan lahir para pribadi yang bertanggung jawab dan cerdas berideologi di bidangnya masing-masing.

Kegiatan yang dilakukan yaitu pengenalan seputar Pancasila mulai dari tataran teoritis—seperti sejarah, makna sila Pancasila, filsafat Pancasila—hingga aktualisasi sila-sila Pancasila dalam tataran teoritis dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan pergaulan dunia internasional. Warga negara tidak hanya dipersiapkan untuk cerdas berinteraksi dalam konteks keindonesiaan tetapi juga perlu dibina untuk menjadi warga negara global. Tataran teoritis dapat dijabarkan dengan membuat sebuah modul yang berisikan persoalan seputar Pancasila namun harus digarisbawahi bahwa konten yang terdapat di dalamnya harus terlepas dari kepentingan politik jangka pendek pihak-pihak tertentu tetapi murni ditujukan pada masa depan pemahaman peserta didik sebagai warga negara yang baik dan cerdas sebagai penerus cita-cita bangsa untuk lima atau 10 tahun kedepan. Modul sebaiknya juga mengangkat nilai-nilai kearifan lokal yang memperkuat pemaknaan sila-sila Pancasila, hal ini merupakan suatu bentuk *hidden curriculum*, yang memperkaya pengetahuan dan pemahaman peserta didik. Modul disusun oleh MGMP PKn SMA/SMK/MA sebagai perkumpulan guru bidang studi mata pelajaran di kabupaten/kota (Ahmad Eddison, Hambali, 2021). Hal ini dilakukan agar terdapat penyeragaman materi ekstrakurikuler cerdas berideologi yang dijalankan sekaligus memberdayakan peran keberadaan MGMP PKn dalam mencapai tujuan Pendidikan (Novaroza, 2023). Kecerdasan berideologi harus dimulai dengan pemahaman dan penghayatan terhadap Pancasila.

Penekanan pada tataran teoritis dapat secara bersamaan dilakukan dengan materi pelajaran pendidikan kewarganegaraan di kelas sebab dalam kurikulum untuk tingkatan SMA/SMK/MA cukup banyak memuat materi seputar Pancasila, ditambah lagi dengan pengetahuan awal peserta didik ketika mempelajarinya di SMP/MTs. Dalam kegiatan ekstrakurikuler ini, yang perlu ditekankan adalah aplikasi dari pengetahuan dan pemahaman terhadap sila-sila Pancasila. Kegiatan ini sebaiknya dikoordinasi oleh guru pendidikan kewarganegaraan di sekolah sebab (1) Pancasila merupakan esensi utama dalam pendidikan kewarganegaraan; (2) mengacu kepada tujuan pendidikan kewarganegaraan yakni mempersiapkan warga negara yang baik dan cerdas (*to be a good and smart citizenship*), warga negara yang cerdas adalah warga negara yang memahami dan menghayati ideology negaranya, (Prastowo, 2013) melalui refleksi dalam dirinya, ia akan mampu menerapkan nilai-nilai ideology tersebut dengan kesadaran bukan dengan paksaan.

Menerapkan ideology dengan paksaan hanya menumbuhkan kepatuhan dan ketaatan yang bersifat semu dan sementara sembari kekuatan pemaksa tersebut eksis, ketika daya paksa telah lemah maka gejolak ketidakpuasan yang berujung pemberontakan atau *chaos* akan muncul ke permukaan seperti bisul yang menyembul nanah karena sudah sejak lama menyentak di dalam namun belum menemukan cara untuk keluar. Keadaan ini sama-sama memunculkan kerugian baik bagi warga negara maupun bagi negara. Ekstrakurikuler cerdas berideologi tidak dimaksudkan memaksa peserta didik untuk mempelajari ideology negara dengan cara-cara indoktrinatif justru sebaliknya diajarkan dengan cara-cara yang edukatif dan menyenangkan. Ideology tentu berisi tentang cita dan kebajikan. Ideology Pancasila berisi

tentang cita masyarakat dan negara yang didambakan serta nilai-nilai kebajikan pancasila yang diharapkan dapat terealisasi dalam berbagai bidang kehidupan. Kebajikan harus diajarkan lewat proses pembudayaan dan habituasi/pembiasaan sejak dini. Kebajikan tidak bisa diajarkan lewat teori, ceramah dan cara-cara yang simbolik dan hanya berkisar di dalam kelas. Oleh karena itu, ekskul cerdas berideologi didesain bukan dengan kegiatan pembelajaran kaku di dalam kelas melalui metode-metode ceramah. Ekskul ini dapat dilakukan di alam terbuka apakah di area lapangan sekolah, taman sekolah atau area lingkungan sekitar sekolah.

Kegiatan ini sebaiknya tidak dilakukan secara massal, dalam artian pelatihan diberikan secara berkelompok, bergelombang dan berkala sehingga guru Pembina dapat intens berkomunikasi, bersosialiasi berdialog/berdiskusi dengan para peserta didik. kegiatan ekskul dapat menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat di daerah sekitar sekolah, pejabat birokrat atau akademisi di lingkungan sekolah, guru-guru bahkan kepala sekolah dapat menjadi narasumber. Mendeskripsikan pengalaman keberhasilan, semangat, contoh aplikatif pengamalan sila pancasila dalam kehidupannya dan seruan untuk belajar giat dan dengan peminatannya masing-masing. Kecerdasan berideologi diperlukan dalam semua bidang kehidupan karena pancasila sebagai ideology negara telah dijabarkan dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, hankam sehingga harus dipelihara dan dipertahankan demi cita dan kebajikan yang diharapkan (Alaby, 2019; Triyono et al., 2022). Kegiatan ekskul cerdas berideologi sebaiknya dimasukkan dalam kurikulum sekolah karena mengandung beberapa kelebihan bagi peserta didik maupun warga sekolah lainnya yakni (1) menanamkan dan membina jiwa kepemimpinan berdasar sila pancasila pada para peserta didik sejak dini sehingga pengetahuan dan pemahaman awal seputar pancasila tidak hanya berkisar di tataran teoritis tapi juga merambah pada tataran praktis dengan adanya kegiatan ekskul cerdas berideologi; (2) menghindari cara-cara indoktrinatif dalam mengajarkan ideology kepada generasi muda tetapi disampaikan dengan cara-cara yang edukatif, motivatif, kreatif dan menyenangkan; (3) menanamkan spirit kebangsaan untuk menumbuhkan semangat belajar dan berkarya kepada para peserta didik sesuai dengan peminatannya masing-masing; (4) mempererat hubungan semua warga sekolah karena terlibat dan ikut dalam kegiatan ekskul cerdas berideologi.

Kurikulum bukanlah kumpulan pembelajaran. Kurikulum merupakan program pembelajaran yang memuat kumpulan mata pelajaran, pembiasaan tingkah laku, kegiatan sekolah seperti ekstrakurikuler dan kegiatan sosial seperti bakti sosial pelajar, bazaar dan pelatihan-pelatihan. Kesemua kegiatan tersebut dapat memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi peserta didik. Mengembangkan potensi yang mereka miliki, bukan mendominasi sehingga mematikan kreatifitas dan potensi tersebut. Pendidikan diselenggarakan dengan member keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran (pasal 4 ayat (4) UU No.20/2003). Guru berfungsi sebagai fasilitator yang memberikan bimbingan agar potensi yang dimiliki peserta didik dapat berkembang serta membina karakter peserta didik (Permady, Gigie Cahya, 2022). Sisi akademik dan karakter harus berjalan secara seimbang sebab jikalau hanya cerdas secara akademik akan membuat mereka menjadi pribadi yang pragmatis (Omeri, 2015). Banyak contoh yang dapat kita lihat dari sisi ini, pejabat negara yang menjadi koruptor merupakan orang-orang yang memiliki intelegensi tinggi tetapi lemah dalam karakter sehingga

menyebabkan kerugian bagi orang lain. oleh karena itu, sekolah dan guru mempunyai tanggung jawab akademik dan moral untuk membina sisi akademik dan karakter peserta didik agar nantinya dapat menjadi pribadi-pribadi yang mampu membangun peradaban (Zaman, 2019) sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional yakni Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta Tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap dan kreatif.

Era globalisasi ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mempercepat terjadinya mobilisasi informasi, komunikasi dan transportasi menjadikan jarak antar negara tanpa sekat. Terdapat banyak keuntungan jika mampu memanfaatkan era digital seperti kemudahan dalam mendapatkan informasi dan berkomunikasi namun juga terkandung eksese-eksese negative di dalamnya seperti kejahatan *cyber* yang bersifat lintas negara serta persaingan di bidang ekonomi yang bersifat kompetitif (Asmaroini, 2016; Silitonga, 2020). Oleh karena itu, peran pendidikan kewarganegaraan cukup strategis dalam mempersiapkan warga negara global. Dalam konteks globalisasi, pendidikan berperan strategis untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam percaturan internasional. Salah satu potensi signifikansi pendidikan terhadap dunia masa depan yaitu pendidikan merupakan cara terbaik yang dapat ditempuh masyarakat untuk membimbing perkembangan manusia sehingga berkembang dan terdorong untuk memberikan kontribusi pada kebudayaan hari esok (kokom Komalasari,2009). Kompleksitas permasalahan di di era globalisasi baik di bidang sosial, budaya, ekonomi, pertahanan keamanan, politik menuntut pengetahuan dan pemahaman bagi warga negara agar tidak hanya menjadi objek (Njatrijani, 2018). Kecerdasan berideologi diperlukan agar dalam era globalisasi yang kompetitif dan kompleks, tidak mengancam kedaulatan indonesia baik secara teritori maupun secara ideology.

4. Simpulan dan Saran

Indonesia merupakan negara yang majemuk dengan perbedaan menonjol dari segi ras, agama, bahasa dan suku bangsa. Inilah yang menjadi potensi terjadinya disintegrasi jika di dalam setiap diri warga negara tidak diberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai nasionalisme dan kekhasan keberagaman yang terdapat di Indonesia. Namun, berkahnya, di Indonesia, kebersamaan nilai terungkap dalam pancasila sehingga pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan perekat yang menyatukan perbedaan dalam realitas sosial yang ada. Untuk terus menyemai dan menginternalisasi nilai Pancasila harus dilakukan upaya-upaya edukatif seperti melalui kegiatan ekstrakurikuler kecerdasan berideologi.

Daftar Pustaka

Buku

Cindy Adams. 2018. Bung Karno : penyambung lidah rakyat Indonesia. Yogyakarta : Yayasan Bung Karno

- Franz Magnis-Susesno. 2009. *Etika Kebangsaan Etika Kemanusiaan*. Jakarta: Kanisius.
- Kokom Komalasari. 2009. *Kewarganegaraan Indonesia: Konsep, Perkembangan Dan Masalah Kontemporer*. Bandung: Laboratorium UPI.
- Mohammad Hatta. 2011. *Untuk Negeriku: sebuah otobiografi/ Mohammad Hatta*. Jakarta : Kompas Media Nusantara
- Moh Mahfud MD. 2009. *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*. Jakarta : Rajawali Press.
- Nugroho Notosusanto. 1985. *Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara*. Jakarta : Balai Pustaka
- Notonagoro. 1983. *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Bina Aksara
- Notonagoro. 1988. *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. Jakarta : Bina Aksara
- Suwarma Al Muchtar. 2016. *Ideology Pancasila: Kajian Filsafat Teori Politik Dan Pendidikan*. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri
- Soejanto Poespowardojo. 1989. *Filsafat Pancasila: Sebuah Pendekatan Sosio Budaya*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Yudi Latif. 2011. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasional, Dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia.

Artikel

- Ahmad Eddison, Hambali, H. (2020). Penguatan Nilai-Nilai Pancasila Guna Membangun Kecerdasan Berideologi Pada Guru Ppkn SMA/SMK Kota Dumai. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3), 993–1005.
- Ahmad Eddison, Hambali, H. (2021). Peranan Modal Sosial pada MGMP PPKn dalam Membentuk Kompetensi Guru di Kota Pekanbaru. *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKN*, 8(2), 105–115. <https://doi.org/10.36706/jbti.v8i2.15606>
- Ahmad Eddison, Hambali, H. (2023). Pelatihan Pembuatan Media Pembelajaran Pancasila Pada Guru MGMP PPKn SMA / SMK. *JCES*, 6(1), 2–10.
- Alaby, M. A. (2019). Membumikan Nilai Pancasila Pada Generasi Bangsa. *Gema Wiralodra*, 10(2), 179–190. <https://doi.org/10.31943/gemawiralodra.v10i2.75>
- Alim, S. (2019). Islam , Multikulturalisme , dan Pancasila. *Jurnal Kajian Dakwah Dan Kemasyarakatan*, 23(2), 85–99.
- Asmaroini, A. P. (2016). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Bagi Siswa Di Era Globalisasi. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(2), 440. <https://doi.org/10.25273/citizenship.v4i2.1076>
- Hariyanti. (2022). Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Guna Membangun Kecerdasan Berideologi Peserta Didik Di Persekolahan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2), 60–68.
- Hasanah, U. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Di Kalangan Generasi Millenial Untuk Membendung Diri Dari Dampak Negatif Revolusi Industri 4.0. *Pedagogy : Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(1), 52–59. <https://doi.org/10.51747/jp.v8i1.705>
- Kardiman, Y., Muchtar, S. Al, Abdulkarim, A., & Sapriya. (2020). *Pancasila and Civilized Society*. 418(Acec 2019), 380–385. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200320.072>
- Muchtar, S. Al. (2020). pendekatan pendidikan etika politik pancasila dalam pendidikan pancasila dan kewarganegaraan di indonesia. *Jurnal Majelis*, 5, 33.
- Muchtar, S. Al, & Iswandi, D. (2018). *The Paradigm of Value Ideology of Pancasila as the Basis of Citizenship Education in the Global Perspective*. 251(Acec), 492–496. <https://doi.org/10.2991/acec-18.2018.112>

- Njatrijani, R. (2018). Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Kota Semarang. *Gema Keadilan Edisi Jurnal (ISSN: 0852-011)*, Volume 5,(September), 17–18.
- Novaroza, V. (2023). *Pengaruh Pembelajaran PKn terhadap Wawasan Kebangsaan Mahasiswa Universitas Riau*. 05(03), 9370–9379.
- Omeri, N. (2015). Pentingnya Pendidikan Karakter Dalam Dunia Pendidikan. *Manager Pendidikan*, 9(3), 464–468.
- Permady, Gigieh Cahya, H. (2022). Pengembangan Nilai Religious Peserta Didik. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 285–294.
- Prastowo, A. (2013). Perubahan Kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SD/MI di Indonesia: Dari KTSP Menuju Kurikulum 2013. *Jurnal Tarbiyah Al-Awlad*, VIII(01), 36–52.
- Raharjo, R. (2020). Analisis Perkembangan Kurikulum PPKn: Dari Rentjana Pelajaran 1947 sampai dengan Merdeka Belajar 2020. *PKn Progresif: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Kewarganegaraan*, 15(1), 63. <https://doi.org/10.20961/pknp.v15i1.44901>
- Silitonga, T. B. (2020). Tantangan globalisasi, peran negara, dan implikasinya terhadap aktualisasi nilai-nilai ideologi negara. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 17(1), 15–28. <https://doi.org/10.21831/jc.v17i1.29271>
- Triyono, M. S., Suhaemi, M., Mufatiroh, S., & Istiqomah, N. (2022). Merajut Asa dan Rasa Untuk Generasi Pancasila Melalui Budaya Gotong Royong di Desa Banyu Asih Bogor. *Jurnal Citizenship Virtues*, 2(1), 301–310.
- Widodo, B., Al Muchtar, S., & AR, E. D. (2022). Pancasila Literacy to Build Insightful Citizenship Civilization Environment in the Industrial Age 4.0. *Proceedings of the Annual Civic Education Conference (ACEC 2021)*, 636(Acec 2021), 46–52. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220108.009>
- Zaman, B. (2019). Urgensi pendidikan karakter yang sesuai dengan falsafah bangsa ndonesia. *AL GHAZALI , Jurnal Kajian Pendidikan Islam Dan Studi Islam*, 2(1), 16–31. https://www.ejournal.stainupwr.ac.id/index.php/al_ghzali/article/view/101